BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Kinerja *(performance)* adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya.

Sedangkan pengukuran kinerja *(performance measurement)* adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas: efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan); hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan (Robertson, 2002). Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja mencakup penilaian indicator kinerja sasaran yang tertuang dalam formulir *Pengukuran Kinerja.*

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran, program/kegiatan dilakukan melalui media rencana kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya. Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran, dan hasil, mengukur kehematan, efektifitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk indikator manfaat dan dampak dapat diukur pada akhir periode selesainya tujuan Instansi Pemerintah. Hal ini terkait pada pertimbangan biaya dan tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam mengukur indikator kinerja dampak.

Dengan demikian setiap instansi pemerintah harus memberikan pertanggungjawaban dalam pengertian mampu menjawab dan menerangkan

kinerja serta tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Dalam akuntabilitas kinerja terdapat pengukuran dan evaluasi kinerja suatu SKPD. Evaluasi kinerja dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*perfomance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. Pada evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara :

1. Target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja .

Adapun metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah dengan membandingkan rencana dengan realisasi sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja. Formula pengukuran kinerja dengan membandingkan rencana dan realisasi menggunakan penghitungan sebagai berikut :

   Capaian Indikator Kinerja : $\frac{\textbf{Realisasi}}{\textbf{Target}}$ **x 100%**
2. Apabila menghitung presentase kenaikan , digunakan rumus :

   Capaian Indikator Kinerja : $\frac{\textbf{Capaian Akhir – Capaian Awal}}{\textbf{Capaian Awal}}$ **x 100%**

   Dari perhitungan tersebut diperoleh gambaran kenaikan dalam bentuk persentase.

Untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran. Pengukuran ini bermanfaat untuk pembelajaran dan evaluasi atas kinerja,

disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam 5 (lima) kelompok penilaian :

Tabel 3.1
Skala Penilaian Realisasi Kinerja terhadap Target

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

A CAPAIAN KINERJA DPMPTSP 2024

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis, khususnya terhadap Indikator Kinerja Program (IKP) dominan pada tiap-tiap sasaran strategis. Analisis juga dilakukan terhadap indikator yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja sasaran namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran strategis.

Analisis tentang dua sasaran strategis yang ditetapkan oleh DPMPTSP sebagai alat untuk mewujudkan tujuan strategis pada Renstra yaitu pada Tahun 2024, disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	2024		
		Target	Realisasi	%Realisasi
1	Peningkatan Nilai Realisasi Investasi PMA & PMDN	25%	126.3%	505.28%
2	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	98	92,13	94,01%

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Indikator Peningkatan Nilai Realisasi Investasi PMA & PMDN

Presentase peningkatan nilai realisasi investasi PMA & PMDN dengan target 25% terealisasi 126.3% sehingga pencapaiannya sebesar 505.28%. Adanya proyek-proyek pembangunan di wilayah Kecamatan Sepaku berkontribusi terhadap peningkatan nilai investasi di Kabupaten Penajam Paser Utara. Selain itu, DPMPTSP Kabupaten Penajam Paser Utara turut berpartisipasi dalam kegiatan Promosi Penanaman Modal (APKASI) di Jakarta yang dilaksanakan pada tahun 2024 untuk menarik minat investor serta memperkenalkan potensi investasi yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara kepada para calon investor .

b) Indikator Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)

Nilai IKM yang terealisasi pada tahun 2024 sebesar 92.13 nilai indeks. Secara presentase antara target dan capaiannya, nilai ini terealisasi sebesar 94.01% Meskipun tidak mencapai target, namun nilai ini menunjukkan kepuasan masyarakat terhadap DPMPTSP Kabupaten Penajam Paser Utara sudah sangat baik.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa indikator kinerja strategis telah tercapai. Pencapaian kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan target kinerjanya, dapat dikategorikan **"Sangat tinggi"**. Secara lebih rinci, capaian indikator kinerja dijabarkan dalam uraian strategis sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 :

Peningkatan Kualitas Pelayanan Investasi/Penanaman Modal berbasis Elektronik

Sasaran 1	***Peningkatan Kualitas Pelayanan Investasi/Penanaman Modal berbasis Elektronik***
Indikator 1	**Peningkatan Nilai Realisasi Investasi PMA & PMDN**

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi investasi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Peningkatan Nilai Realisasi Investasi PMA & PMDN. Peningkatan Nilai Investasi suatu wilayah dapat berdampak pada penekanan angka pengangguran sebagai bentuk dari penciptaan lapangan kerja yang meluas dan menyerap tenaga kerja. Kondisi tersebut juga secara tidak langsung dapat mereduksi angka kemiskinan melalui peningkatan pendapatan per kapita masyarakat.

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Peningkatan Kualitas Pelayanan Investasi/Penanaman Modal berbasis Elektronik
Tahun 2024

INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN 2023 (Tahun Dasar)	CAPAIAN TAHUN 2024	2024			TARGET AKHIR 2026 (Sesuai Renstra)	CAPAIAN S/D 2024 TERHADAP TARGET AKHIR 2026 (%)	
			TARGET %	REALISASI %	% REALISASI			
Peningkatan Nilai Realisasi Investasi PMA & PMDN	1.637.143.260.000	3.705.197.869.077	25	126.32	505.28	5%	126.32	2526.4%

**) Angka dalam satuan rupiah*
***) Data Berdasarkan Press Release Prov. Kaltim TW IV tahun 2024*

Analisis pembandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan target yang ditetapkan

Pada tahun 2024, Nilai realisasi Investasi Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp 3.705.197.869.077,- dengan presentase kenaikan yang sebesar 126.32% dari tahun 2023 (tahun dasar) dan presentase pencapaian target sebesar 505.28%. Presentase ini menunjukkan peningkatan nilai realisasi investasi PMA&PMDN telah jauh melampaui target.

Dalam dokumen Perjanjian Kinerja, capaian dari indikator Peningkatan Nilai Realisasi Investasi PMA & pada tahun 2024 dapat dikategorikan "**sangat tinggi**".

Meningkatnya realisasi investasi PMA dan PMDN di tahun 2024 ini dikarenakan meningkatnya investasi di Sektor Listrik, Gas , Air serta sektor hotel dan restoran serta jasa lainnya yang sebagian besar berada di wilayah IKN. Pendataan Realisasi Investasi di wilayah IKN masih dalam satu ruang lingkup dengan Kecamatan Sepaku, dikarenakan belum adanya peraturan mengenai pemisahan antara Kecamatan Sepaku dengan Wilayah IKN. Sehingga meningkatnya investasi di Wilayah IKN di tahun 2024 menjadi faktor penyumbang kenaikan Realisasi Investasi di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Analisis pembandingan realisasi kinerja tahun 2022 sampai dengan tahun 2024

Tabel 3.4
Presentase Peningkatan Realisasi Investasi Tahun 2020 - 2024

TAHUN	TOTAL	%Peningkatan
2022	1.394.672.997.948	
2023	1.637.143.260.000	17,39
2024	3.705.197.869.077	126.32
TOTAL	7.736.877.207.025	

Sumber : Press release DPMPTSP Prov Kaltim 2022-2024

Peningkatan realisasi investasi dari tahun 2022 hingga tahun 2024 terus mengalami peningkatan positif. Hal ini menunjukan bahwa tren perkembangan iklim investasi di Kabupaten Penajam Paser Utara meningkat setiap tahunnya. Puncak peningkatan nilai realisasi Investasi di Kabupaten Penajam Paser Utara terjadi pada tahun 2024, dikarenakan pada tahun tersebut pembangunan infrastruktur penunjang di Wilayah IKN semakin meningkat dan kepatuhan pelaku usaha terhadap pelaporan LKPM mempengaruhi hasil peningkatan nilai realisasi Investasi di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Analisis pembandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang yang terdapat dalam Renstra

Dalam renstra DPMPTSP tahun 2024-2026, Capaian DPMPTSP terhadap sasaran strategis Peningkatan Pelayanan Prima Kepada Publik Indikator pertama, Peningkatan Nilai Realisasi Investasi PMA & PMDN dengan target 5% adalah sebesar 2526.4%. Capaian ini sangat melampaui target dikarenakan percepatan pembangunan di Wilayah IKN yang mendorong tingginya nilai investasi yang masuk ke Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Analisis pembandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi di Level Provinsi dan/atau Kabupaten Lainnya.

Tabel 3.5
Perbandingan Nilai Realisasi Investasi Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Nilai Realisasi Investasi Kabupaten Paser Tahun 2024

TAHUN	NILAI REALISASI INVESTASI PMA & PMDN PROV. KALTIM	%	NILAI REALISASI INVESTASI PMA & PMDN KAB. PASER	%	NILAI REALISASI INVESTASI PMA & PMDN KAB. PENAJAM	%	KET
2023	72.162.354.700.000	-	3.611.108.640.000	-	1.637.133.260.000	-	THN DASAR
2024	76.335.036.077.733	5.78	3.121.759.153.281	-13.5	3.705.197.869.077	126.32	

Sumber : Press release Tw. IV DPMPTSP Prov Kaltim

Pada tabel tersebut, Capaian Realisasi Investasi di Kabupaten Paser pada tahun 2023 jauh lebih tinggi di bandingkan Kabupaten Penajam Paser Utara, namun pada 2024 Capaian Realisasi Investasi Kabupaten Penajam Paser Utara lebih tinggi jika di bandingkan capaian Kabupaten paser yakni sebesar peningkatan sebesar 126% sedangkan Realisasi Investasi di Kabupaten Paser sebesar -13.5%. ini juga berkaitan dengan pembangunan IKN yang semakin gencar di tahun 2024 sehingga menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Jika dibandingkan capaian antara Provinsi Kalimantan Timur dengan capaian realisasi investasi Kabupaten Penajam Paser Utara di tahun 2024, Kabupaten Penajam Paser Utara menyumbang 4.85% dari total capaian Nilai realisasi Investasi Provinsi Kalimantan Timur.

Analisis upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja

Beberapa upaya yang dilaksanakan DPMPTSP Kabupaten Penajam Paser Utara untuk meningkatkan minat investasi sebagai berikut:

1. Peningkatan peran dan kinerja penanaman modal untuk menarik investor;
2. Kelakukan koordinasi-koordinasi terkait permasalahan investasi secara internal maupun dengan instansi terkait;
3. Meningkatkan sinergi antara pemangku kepentingan;
4. Melakukan pendampingan khusus kepada calon investor;
5. Percepatan dan peningkatan kualitas layanan perizinan;
6. Menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik
7. Menyusun Rencana kegiatan dengan mempertimbangkan kebutuhan sesuai dengan target kinerja;

Analisis penyebab keberhasilan / peningkatan kinerja

Faktor Penyebab Keberhasilan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penajam Paser Utara selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Adanya komitmen dari semua aparatur, pejabat struktural dan fungsional di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penajam Paser Utara;
2. Melaksanakan bimbingan teknis/sosialisasi dalam rangka pendampingan kepada pelaku usaha dalam penyampaian LKPM

(Bimbingan Teknis Implementasi Perizinan, Pengawasan Perizinan berusaha berbasis resiko dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal);

3. Pendampingan dan fasilitasi kepada pelaku usaha terkait permasalahan pelaporan LKPM (Kegiatan penyelesaian permasalahan Penanaman Modal);
4. Melaksanakan bimtek/sosialisasi dalam rangka memfasilitasi kemudahan berusaha bagi para pelaku usaha (Sosialisasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko);
5. Merancang Kebijakan-kebijakan maupun Peraturan tentang Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha (Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2024 tentang pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah);
6. Membuat Dokumen Peta Potensi Kabupaten Penajam Paser Utara;
7. Pemanfaatan media sosial sebagai wadah promosi dan informasi.
8. Turut serta dalam kegiatan promosi nasional agar mendatangkan minat (Investasi Promosi Investasi APKASI di DKI Jakarta).
9. Melaksanakan Inovasi dalam bentuk penghargaan terhadap pelaku usaha yang tepat waktu dalam penyampaian LKPM. pengawasan penanaman modal (inovasi Berinvest "Tertib perizinan dan pelaporan investasi").

Analisis upaya di masa akan datang yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pencapaian kinerja

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pencapaian kinerja peningkatan nilai realisasi investasi yaitu :

1. Peningkatan kegiatan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
2. Peningkatan promosi investasi melalui event dan forum kerjasama investasi;
3. Optimalisasi penyusunan kebijakan yang mendorong kemudahan investasi;
4. Pengembangan perencanaan investai melalui kajian/peta potensi investasi.

Analisis atas efisiensi penggunaan anggaran

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Program dan Kegiatan Dinas Selain dilihat dari pengukuran kinerja sasaran dan pengukuran

kinerja kegiatan, akuntabilitas juga dapat dilihat dari akuntabilitas keuangannya, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKIP). Pengukuran efisiensi penggunaan anggaran untuk Sasaran Strategis 1 *"Peningkatan Kualitas Pelayanan Investasi/Penanaman Modal berbasis Elektronik"* disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.6
Pengukuran Efisiensi Penggunaan Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Investasi/Penanaman Modal berbasis Elektronik	Peningkatan Nilai Realisasi Investasi PMA& PMDN	25	126.32	505.28	1.924.191.475	1.545.887.107	81.04
Tingkat Efisiensi					**424.24 %**			

Untuk mencapai Sasaran Strategis Peningkatan Kualitas Pelayanan Investasi/Penanaman Modal berbasis Elektronik dengan nilai presentase capaian kinerja sebesar 505.28% dan presentase penyerapan anggaran pendukung sasaran tersebut sebesar 81.04%%. Sehingga dapat diketahui tingkat efisiensinya sebesar 424.24%.

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Terdapat **5** program dan **10** sub kegiatan yang di laksanakan tahun 2024 yang menunjang langsung terhadap pencapaian kinerja Peningkatan Pelayanan Prima Kepada Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Adapun program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7
Program dan Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan
1.	**Peningkatan Kualitas Pelayanan Investasi/Penanaman Modal berbasis Elektronik**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**
		Sub Kegiatan Penyediaan Rencana Umum Penananaman Modal Kabupaten/kota
		Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
		Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
		Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
		Pengawasan Penanaman Modal
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Sasaran Strategis 2 : *Peningkatan Dukungan Pelayanan Publik berbasis Teknologi Informasi*

Sasaran 2	***Peningkatan Dukungan Pelayanan Publik berbasis Teknologi Informasi***
Indikator 1	**Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)**

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam hal memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. IKM ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kepuasan masyarakat terhadap layanan atau produk tertentu yang disediakan oleh suatu lembaga atau pemerintah. Laporan IKM ini biasanya digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kualitas layanan atau produk, serta untuk memahami kebutuhan dan harapan masyarakat yang dilayani.

Melalui penyusunan IKM ini, diharapkan dapat dijadikan penilaian dan sebagai gambaran tentang kinerja pelayanan PTSP agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan.

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penajam Paser Utara dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Pelaksanaan SKM menggunakan 2 kuesioner yaitu secara manual yang disebarkan kepada pengguna layanan dan secara online dengan menggunakan google formulir. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penajam Paser Utara meliputi Persyaratan, Sistem, Mekanisme, Prosedur, Waktu penyelesaian, Biaya/Tarif, Produk spesifikasi jenis layanan,

Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Penanganan pengaduan, saran dan masukan, Sarana dan prasarana.

Adapun hasil pengukuran SKM DPMPTSP pada Triwulan IV tahun 2024 dengan jumlah 145 responden, sebagai berikut :

Tabel 3.8
Hasil Pengukuran Survey SKM DPMPTSP

No	Unsur SKM	Nilai Rata-Rata
1	Persyaratan	3.60
2	Prosedur	3.59
3	Waktu Penyelesaian	3.57
4	Biaya/Tarif	3.99
5	Produk spesifikasi jenis layanan	3.62
6	Kompentensi Pelaksana	3.62
7	Perilaku Pelaksana	3.64
8	Sarana dan Prasarana	3.62
9	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	3.91
Nilai Rata-Rata		3.68
Nilai IKM		92.13

Tabel diatas menunjukkan nilai SKM dengan mutu pelayanan "A" dan kinerja unit pelayanan yang artinya tingkat Kepuasan Pelayanan pada DPMPTSP Kab. Penajam Paser Utara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam kategori "SANGAT BAIK".

Jika dilihat dari hasil pengukuran, untuk NRR (Nilai Rata-rata) per unsur yang memiliki nilai tertinggi yaitu unsur biaya/tarif yaitu 3.99. Unsur penilaian biaya/tarif dikategorikan „SANGAT BAIK" atau nilainya A, disebabkan layanan yang diberikan kepada seluruh pemohon adalah tidak dikenakan biaya atau tarif Rp. 0,- sehingga masyarakat penerima jasa layanan merasa puas dan tidak terbebani dengan biaya pelayanan.

Sedangkan unsur Waktu Penyelesaian adalah 3.57. Hal ini di sebabkan dalam pengurusan izin melibatkan beberapa instansi yang terlibat sehingga menjadi kendala dalam waktu penyelesaian pengurusan perizinan.

Analisis pembandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target yang ditetapkan

Tabel 3.9
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Peningkatan Dukungan Pelayanan Publik berbasis Teknologi Informasi Tahun 2024

INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN 2023 (Tahun Dasar)	CAPAIAN TAHUN 2024	2024			TARGET AKHIR 2026 (Sesuai Renstra)	CAPAIAN S/D 2024 TERHADAP TARGET AKHIR 2026 (%)	
			TARGET %	REALISASI %	% REALISASI			
Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	93.60	92.13	98	92.13	94.01%	90.07	94.01	104.37

**) Angka dalam satuan rupiah*
***) Data Berdasarkan Laporan SKM TW IV 2024*

Di tahun 2024 ini IKM DPMPTSP Kabupaten Penajam Paser Utara mencapai 92.13% dan memenuhi 94,01% dari target kinerja (98%). Capaian kinerja dengan nilai SKM ini termasuk dalam kriteria penilaian sangat berhasil. Namun dalam target kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan (Renstra) yaitu nilai SKM 90.07% telah terealisasi dengan nilai IKM sebesar 104.37% (Baik). Capaian kinerja dengan nilai SKM ini termasuk dalam kriteria penilaian sangat berhasil.

Analisis pembandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan beberapa tahun terakhir

Perbandingan antara Nilai IKM pada DPMPTSP Kabupaten Penajam Paser Utara selama 3 (tiga) tahun terakhir disajikan dalam grafik berikut :

Grafik 3.*1*
Nilai IKM DPMPTSP Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022 – 2024

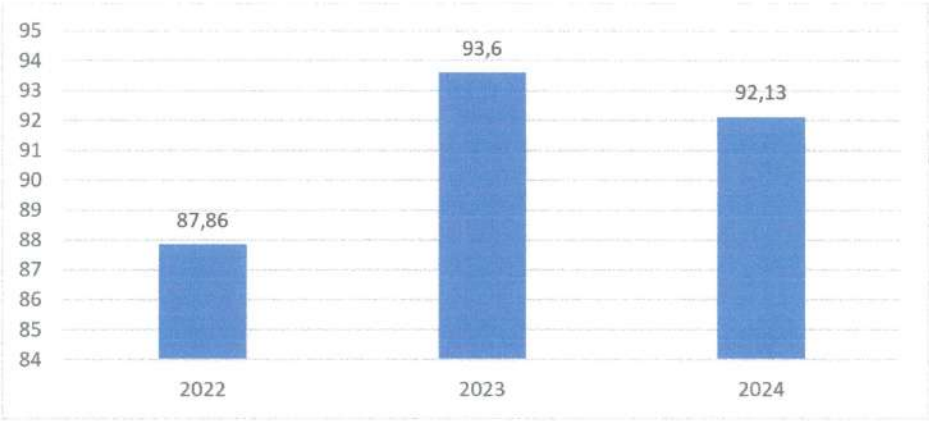

Sumber : Laporan SKM DPMPTSP Kab. PPU Tahun 2022-2024

Perolehan nilai IKM DPMPTSP setiap tahunnya berfluktuasi. Pada tahun 2024, terjadi penurunan Nilai IKM dibandingkan tahun 2023 dikarenakan DPMPTSP memiliki sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Analisis pembandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah yang yang terdapat dalam Renstra

Target kinerja tahun 2024 yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan (Renstra) yaitu nilai IKM 90.07% telah terealisasi 92.13% sehingga presentase capaian nilai IKM sebesar 104.37%. Capaian kinerja dengan nilai IKM ini termasuk dalam kriteria penilaian "sangat baik".

Analisis pembandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi di Level Provinsi dan/atau Kabupaten Lainnya

Perbandingan nilai IKM antara DPMPTSP Kabupaten Penajam Paser Utara, Nilai IKM DPMPTSP Kabupaten Paser dan Nilai IKM Kabupaten Penajam Paser utara di sajikan dalam Grafik sebagai berikut :

Grafik 3.2
Perbandingan Nilai IKM DPMPTSP Kab. PPU, Nilai IKM DPMPTSP Kab. Paser dan IKM DPMPTSP Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024

Sumber :

- *Laporan SKM DPMPTSP Kab. PPU Tahun 2024*
- *Laporan SKM DPMPTSP Kab. Paser Tahun 2024*
- *Laporan SKM Semester II DPMPTSP Provinsi Kaltim Tahun 2024*
-

Berdasarkan grafik tersebut, Nilai IKM DPMPTSP Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebesar 92,13%, Nilai IKM DPMPTSP Kabupaten Paser sebesar 81,66% dan Nilai IKM DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur sebesar 91.94%. Hal ini menunjukkan Nilai IKM DPMPTSP Kabupaten Penajam Paser Utara 0.19% lebih tinggi di bandingkan perolehan Nilai IKM DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur.

Analisis upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja

Beberapa upaya yang dilaksanakan DPMPTSP Kabupaten Penajam Paser Utara untuk Meningkatkan Dukungan Pelayanan Publik berbasis Teknologi Informasi sebagai berikut:

- Mengoptimalkan sosialisasi alur dan prosedur perizinan oleh petugas pelayanan.
- Membuat rancangan alur / mekanisme perizinan sesederhana mungkin agar lebih mudah dipahami oleh pemohon.
- Melakukan peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia melalui berbagai bimbingan teknis.
- Mengevaluasi Standar Pelayanan dan Koordinasi secara komprehensif untuk mewujudkan SOP bersama dalam kecepatan penyelesaian izin.

Analisis penyebab kegagalan / penurunan kinerja

Faktor Penyebab kegagalan/penurunan capaian sasaran strategis Meningkatkan Dukungan Pelayanan Publik berbasis Teknologi Informasi yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penajam Paser Utara selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Masih ada beberapa beberapa proses penerbitan perizinan yang melewati batas waktu yang telah tertera di perbub SOP dikarenakan kendala administrasi dan teknis.
- Untuk unsur-unsur yang rendah agar dievaluasi akar permasalahannya sehingga
  kedepannya unsur terhadap nilai yang rendah tersebut akan meningkat dari yang
  sebelumnya, dan untuk unsur yang tinggi agar terus dipertahankan dan ditingkatkan guna menghasilkan pelayanan yang prima.

Analisis upaya di masa akan datang yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pencapaian kinerja

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pencapaian kinerja peningkatan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yaitu :

1. Penyederhanaan prosedur perizinan guna percepatan berusaha seperti revisi standar operasional prosedur pelayanan perizinan/non perizinan dan revisi standar pelayanan perizinan dan non perizinan.
2. Penambahan fasilitas pendukung berupa sarana dan prasarana pelayanan yang menyamankan para pelaku usaha dan masyarakat.
3. Koordinasi dan kerjasama yang intens antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan teknis terkait agar percepatan penerbitan izin dapat diwujudkan.

Analisis atas efisiensi penggunaan anggaran

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Program dan Kegiatan Dinas Selain dilihat dari pengukuran kinerja sasaran dan pengukuran kinerja kegiatan, akuntabilitas juga dapat dilihat dari akuntabilitas keuangannya, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKIP). Pengukuran efisiensi penggunaan anggaran untuk Sasaran Strategis 2 "Peningkatan Dukungan Pelayanan Publik berbasis Teknologi Informasi" disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.10
Pengukuran Efisiensi Penggunaan Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian %	Pagu Rp	Realisasi Rp	Capaian %
1	Peningkatan Dukungan Pelayanan Publik berbasis Teknologi Informasi	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	98	92.13	94.01%	7.516.090.821	7.076.878.301	94.16
Tingkat Efisiensi						**-0.15**		

Untuk mencapai Sasaran Strategis Peningkatan Pelayanan Prima Kepada Publik dengan nilai presentase capaian kinerja sebesar 94.01% dan presentase penyerapan anggaran pendukung sasaran tersebut sebesar 91.46%%. Sehingga dapat diketahui tingkat efisiensinya sebesar -0.15% atau dapat dikatakan "tidak efisien".

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Terdapat **1** program dan **17** sub kegiatan yang di laksanakan tahun 2024 yang menunjang langsung terhadap pencapaian kinerja Peningkatan Dukungan Pelayanan Publik berbasis Teknologi Informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Adapun program dan kegiatan tersebut sebagai berikut:

Tabel 3.11
Program dan Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan
1.	**Peningkatan Dukungan Pelayanan Publik berbasis Teknologi Informasi**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak berwujud
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,

		Sumber Daya Air dan Listrik
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya

B REALISASI ANGGARAN

Analisis keuangan merupakan analisis yang menelaah aspek keuangan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam APBD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 dijelaskan bahwa anggaran yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penajam Paser Utara meliputi :

- Belanja Pegawai
- Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Modal

Realisasi Anggaran Belanja

Realisasi Anggaran Belanja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.12
Realisasi Anggaran Belanja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024*)

No	Uraian Belanja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Belanja Pegawai	4.654.501.401	4.327.541.949	326.959.452
	Belanja Barang dan Jasa	3.636.281.511	3.316.618.459	319.663.052
	Belanja Modal	1.149.499.384	978.605.000	170.894.384
	JUMLAH	**9.440.282.296**	**8.622.765.408**	**817.516.888**

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten penajam paser Utara Tahun 2024;
*Keterangan: *) APBD Kabupaten Penajam Paser Utara setelah perubahan Tahun 2024*

Alokasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 sebelum perubahan APBD sebesar **Rp. 7.987.302.026,-**, Setelah perubahan APBD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 yaitu sebesar **Rp. 9.440.282.286,-** atau mengalami penambahan anggaran sebesar **Rp 1.452.980.260,- (18.1%).** Adapun alasan penambahan anggaran ini karena adanya belanja modal penambahan sarana dan prasarana kantor, belanja kegiatan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM DPMPTSP, dan penambahan mobil operasional penunjang kegiatan DPMPTSP Kabupaten Penajam Paser Utara.

Dalam penyerapan anggaran Tahun 2024, DPMPTSP mengalami Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Belanja Pegawai sebesar Rp 326.959.452,- dikarenakan perpindahan beberapa pegawai ke Perangkat Daerah lain. Belanja Barang dan Jasa mengalami Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp 319.663.052,- dikarenakan terdapat sisa anggaran dari kegiatan-kegiatan DPMPTSP Kabupaten Penajam Paser Utara.

Tabel 3.13
Realisasi Anggaran Belanja per Program
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Program	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%Realisasi
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	7.516.090.821	7.076.878.301	94.16
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	541.036.080	471.406.239	87.13
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	261.633.111	177.360.268	67.79
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	245.851.085	221.398.731	90.05
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	199.344.939	170.583.809	85.57
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	676.326.260	505.138.060	74.69
	TOTAL	**9.440.282.296**	**8.622.765.408**	**91.34**

BAB IV
PENUTUP

LKIP menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, LKIP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintah yang baik.

Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya maka Laporan Kinerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penajam Paser Utara pada Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Dalam analisis keuangan, pada Tahun Anggaran 2024 DPMPTSP Kabupaten Penajam Paser Utara mendapatkan penambahan anggaran sebesar **Rp 1.452.980.260,-** sebagai dukungan untuk penambahan sarana prasarana kantor, peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan serta penambahan mobil operasional untuk menunjang pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan peningkatan pelayanan. Dengan begitu, pada sisi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penajam Paser Utara pada Tahun 2024 penggunaan anggaran dapat dikatakan telah efisien. Di mana capaian penggunaan anggaran tahun **2024** mencapai **91.34%** dari total anggaran.
2. Dalam analisis efektifitas kegiatan-kegiatan yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penajam Paser Utara pada Tahun 2024 dapat dikatakan telah efektif. Hal ini karena kegiatan di masing-masing bidang DPMPTSP telah berjalan sesuai dengan target yang telah di tentukan.
3. Langkah - langkah DPMPTSP Kabupaten Penajam Paser Utara untuk meningkatkan capaian kinerja di masa yang akan datang, sebagai berikut :

a. Melakukan advokasi kepada Pimpinan dengan melakukan ekspose program dan kegiatan DPMPTSP yang dapat mencapai perolehan nilai Investasi dengan adanya dukungan Anggaran yang optimal.
b. Dalam penyusunan perencanaan kegiatan, program dan kebijakan agar mengacu kepada Renstra yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan situasi, kondisi dan aspirasi masyarakat serta dukungan anggaran.
c. Meningkatkan koordinasi atau kerjasama serta evaluasi yang berkelanjutan, baik antar unit kerja dilingkungan Dinas

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Penajam Paser Utara yang dapat disusun, selanjutnya diajukan kepada Bapak Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara dan pihak lain yang berkepentingan untuk dijadikan bahan evaluasi. Atas segala bantuan dari berbagai pihak dalam terwujudnya penyusunan laporan ini disampaikan terimakasih, semoga Allah SWT membalas kebaikannya. Amin Ya Robbal Alamin